

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdul Aziz Wahab, *Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Arifudin, Arifin, dan Zainal, *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*,” (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).

Ayelet Sachar, *The Birthright Lottery: Citizenship and Global Inequality*, (Boston: JSTOR Harvard University Press, 2009).

Bintan Saragih, *Lembaga Perwakilan & Pemilu di Indonesia*, (Gaya Media Pratamah: Jakarta, 1998).

Damri, *Pendidikan kewarganegaraan* (Jakarta: Kencana, 2020).

Dwi Putra Nugraha, *Desain Konstitusi Keseimbangan Bermartabat*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022).

Dwi Putra Nugraha, *Pancasila dalam pusaran politik identitas*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023).

Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010).

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia dan Mahkamah Konstitusi RI*, (Jakarta: PT Rajawali, 2004).

Kurniawati Hastuti Dewi, *Pemilukada Asimetris dalam prespektif NKRI*, (Yogyakarta: Andi, 2016).

Mochamad Aris Yusuf, *Negara Hukum*, (Jakarta, 2016), hal. 24.

Muhamin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020).

Sanapiah Faisal, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Probolinggo: Usaha Nasional, 1982).

Sujit Choudry, *Bridging Comparative Politics and Comparative Constitutional Law*, (Oxford: Oxford University, 2008).

Syamsuddin Haris, *Kecurangan dan Perlawanan Rakyat Dalam Pemilu*, (Tangerang: Yayasan Obor Indonesia, 1997).

Syamsuhadi Irsyad, *Pendidikan kewarganegaraan*, (Bandung: Alfabeta, 2017)

Teguh Prasetyo, *Filsafat Pemilu*, (Bandung: Nusa Media, 2018).

Jurnal:

Ansori, “Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Dalam Menyelenggarakan Pilkada”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, no. 3 (2017).

Bawamenewi, Adrianus. “Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara”. *Jurnal Warta Edisi 63*, Vol. 14, No. 1 (2020).

Bonaventura, Retno, “Implikasi Hukum Status Kewarganegaraan Asing Pada Calon Terpilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah,” Vol 4, No.3, (2022)

Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal TAPIS*, Vol. 12, No. 1, (2016): 37-53, DOI: <https://doi.org/10.24042/tps.v12i1.827>.

Farahdiba Rahma Bactiar, “Pemilu Indonesia: Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi”, *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Franciscus Xaverius Wartoyo, “Peran Negara Menghadapi Problematika Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Lingkungan Hayati”, *Jurnal Waskita*, Vol. 4, No. 1 (2020).

- Franciscus Xaverius Wartoyo, “The Concept and Its Implementation Of Indonesian Legislative Elections Bases On The Pancasila Democracy Prespective”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2019) *urnal UMMAT*, Vol. 2, No. 1 (2019).
- Hans Kelsen, “Teori umum tentang hukum dan negara” Vol. 2, No. 1, (2018).
- Hario Mahar Mitendra, “Fenomena Pada Kekosongan Hukum”, *Jurnal RechtsVinding Online*, Vol. 2, No. 3, (2018).
- Hariyanto, Hariyanto, “Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 3, No. 2. (2020), DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i2.4184>.
- Hariyanto, Hariyanto. “Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila”. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Vol. 1. 2018. 53. DOI: <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v1i1.1731>.
- John Clarke, “Reconstructing Citizenship (again)”, *Citizenship Studeis*, Vol. 26, No. 4-5, (2022).
- Pahlevi, “Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia,” Vol 2, No. 1, (2011).
- Sanger, Jeremy L.C. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilkada”. *Jurnal Lex Administratum*. Vol. VI, No. 4, (2018).
- Supriyadi Arief, “Decompose Dual Nationality In Indonesia Human Rights Prespective Welfare State (Dual Citizenship)”, (2020).
- Uyun, Qurrotul. “Due to Law of Selecting The Right Repudiation Citizenship Status in Citizenship Law Review of Indonesia”. *JARES*, Vol. 4, No. 2 (2019).

Yuniar Galuh Larasati, Henky Fernando, Hasse Jubba, Irwan Abdullah, Muhammad Rifai Darus & Suparto Iribaram “Past preferences informing future leaders for Indonesian 2024 general elections,” Vol 9, No. 1, (2023).

Hasil Penelitian:

Adnan Purichta Ichsan, “Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada di Indonesia”, Disertasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2021.

Imam Choirul Muttaqin, “Kewarganegaraan Ganda Terbatas Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Tayah Muti’ah, “Penyelesaian Sengketa Pilkada Sabu Rajjua (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021)”, Skripsi, Purwokerto: Program Studi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Negri, 2022.

Peraturan Perundang-undangan:

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2016.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Pilkada).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2000 mengenai syarat-syarat menjadi calon kepala daerah.

Putusan:

Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 165-PKE-DKPP/IX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021.

Putusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/pl.02.2-kpt/06/kpu/viii/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-XIX/2021, dan 135/PHP.BUP-XIX/2021

Website/Internetx:

Bawaslu, “Tugas, Wewenang dan Kewajiban”,
<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>,
diakses pada 24 oktober 2023.

International IDEA, “Online Electoral Cycle”, <https://www.idea.int/data-tools/tools/online-electoral-cycle>, diakses pada tanggal 2 November 2023

KPU, “Sejarah Komisi Pemilihan Umum”,
<https://subangkabppid.kpu.go.id/info/0/9825/sejarah-komisi-pemilihan-umum>, diakses pada 20 September 2023.

KPU, “Belajar dari perkara diskualifikasi oleh MK”
<https://www.kpu.go.id/berita/baca/9921/belajar-dari-perkara-diskualifikasi-calon-oleh-mk>, diakses pada 16 Desember 2023.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Perkara Pemilu dan Pilkada”.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18992&menu=2>,
diakses pada 24 Oktober 2023.

Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, “Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Gugat Hasil Pilbup”,
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17152&menu=2>,
diakses pada 20 Agustus 2023.

Tampubolon Legal Solutions, “Indonesian Dual Citizenship”,
<https://www.tampubolonlegalsolutions.com/indonesian-dual-citizenship>,
diakses pada 18 Oktober 2023

Tim Detik Com “Perbedaan Pemilu dan Pilkada”, <https://news.detik.com/pemilu/d-6547496/perbedaan-pemilu-dan-pilkada-pengertian-dan-sistem-pelaksanaannya>,

Tim Hukum Online, “Pengertian, Tujuan dan Fungsi”,
<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 12 Juni 2023.

Tiyas Septiana, “Asas-asas Kewarganegaraan Indonesia”
<https://nasional.kontan.co.id/news/4-macam-asas-kewarganegaraan-yang->

[berlaku-di-indonesia-pengertian-dan-penerapannya](#), diakses pada 20 September 2023.

Kamus:

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjara>.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Adhitya Anugrah Nasution, SH., MH., M.SI, Pengacara Kantor Adhitya Nasution & Partners, Kuasa Hukum Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Tangerang Selatan, Pukul 13.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Fritz Edward Siregar, S.H., LL.M., Ph.D., Salah satu dari lima pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada periode 2017-2022, Tangerang, 9 Oktober 2023, Tangerang, Pukul 11.00 WIB.

Hasil wawancara dengan Yohanis Uly Kale, A.Md., Wakil Bupati Sabu Raijua Periode 2021-2024, Pemohon II dalam Putusan NO. 133/PHP.BUP-XIX/2021, 15 Oktober 2023, Pukul 16.00 WIB.

Bukti Perkara:

Kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Adhitya Nasution & Partners, “Bukti Pemohon Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021”, 6 September 2023.